

Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien

Luh Putu Cynthia Gitayani¹

¹ Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali-Indonesia, E-mail: gitayanichia@yahoo.com

Info Artikel

Keywords :

Notary, Professional ethics, Service

Kata kunci:

Notaris, Etika Profesi, Pelayanan Jasa

Corresponding Author:

Luh Putu Cynthia Gitayani.

E-mail:

gitayanichia@yahoo.com

DOI :

10.24843/AC.2018.v03.i03.p0

3

Abstract

Notary as a public official authorized in the matter of making authentic deeds is the goal of the state in creating legal certainty for the community. Notary are required to provide legal services to people who need their services. In a broad context service is defined not only making a deed, legalizing the deeds under their hands, providing legal counsel or counseling concerning notary areas, but in addition the notary is also tasked with some aspects of facilitating the public to obtain information about the requirements for making authentic deed and hospitality of notary with their employees in serving clients. All of these things are part of full activity of the notary in carrying out his profession. The problems in this research is about the effectiveness of the application of professional ethics by a notary and the legal effect of a notary who does not carry out professional ethics in providing services to clients. This research is an empirical legal research, with using primary data sources and secondary data, collected by library research techniques and interview techniques, and analyzed by qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that notary in carrying out their duties and positions must pay attention to the profession of ethics that they carry out, especially in providing services to clients. Legal services carried out by a notary are required to refer to and obey the provisions of the UUJN and the Notary Profession Code of Ethics. This obedience aims to ensure the notary profession in the community does not reduce the dignity and nobility of the notary profession.

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik merupakan tujuan negara dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris wajib memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat yang membutuhkan jasanya. Pelayanan diartikan dalam konteks yang luas tidak hanya membuat akta, melakukan legalisasi akta di bawah tangan, memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan, tetapi di samping itu notaris juga bertugas terkait dengan sejumlah aspek pemberian kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik, serta keramahan notaris beserta pegawainya dalam melayani klien. Keseluruhan hal tersebut merupakan bagian dari aktivitas penuh notaris dalam menjalankan profesinya. Permasalahan dalam penelitian

ini yaitu mengenai efektivitas penerapan etika profesi oleh notaris dan akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan etika profesi dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sumber data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan wawancara, serta dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang notaris harus memperhatikan etika profesi jabatan yang diembannya terutama dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh seorang notaris wajib mengacu dan taat pada ketentuan UUJN serta Kode Etik Notaris. Acuan dan ketaatan ini bertujuan agar pelaksanaan profesi notaris dalam mengabdikan pada masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat, serta keluhuran profesi notaris.

1. Pendahuluan

Notaris merupakan suatu profesi yang juga menempati posisi sebagai pejabat umum. Dalam posisinya sebagai profesional di bidang hukum, notaris berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Notaris merupakan suatu profesi yang tercipta secara tidak langsung dari hasil interaksi antar masyarakat yang kemudian berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.¹ Peran notaris sebagai ranah pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi permasalahan hukum dilakukan dengan menerbitkan akta otentik sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di kemudian hari.² Jabatan notaris di Indonesia diatur dalam undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN).

Pejabat umum merupakan seseorang yang mengemban suatu jabatan, yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh negara, yang diberikan kewenangan dan kewajiban untuk dapat memenuhi kepentingan anggota masyarakat di bidang hukum keperdataan. Maka dari itu, notaris merupakan suatu organ negara yang dimana negara memberikan wewenang kepada notaris melalui ketentuan dalam UUJN, untuk membuat suatu akta yang otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam melaksanakan sebagian tugas kenegaraan, ia tidak hanya bekerja untuk kepentingannya sendiri, melainkan ia juga dituntut untuk dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan akan pelayanan dan jasa kepada masyarakat terkait dengan perbuatan hukum perdata.³ Sehingga, notaris dalam menjalankan tugas dan

¹Habib Adjie. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama. h. 8.

²Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif*, 17(3), 173-183. h. 2.

³Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DALAM KAITAN CYBER NOTARY. *Acta Comitatus*, 172-182. h. 8.

jabatannya dituntut wajib bersifat mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, tidak memihak memandang status sosial atau derajat seseorang dan memiliki kebebasan karena ia berdiri sendiri (*unpartiality and Independency*).⁴

Notaris di berikan kewenangan secara atributif oleh negara, maka dari itu ia wajib melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk akta dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang berupa dokumen resmi dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁵ Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada notaris tersebut, ia harus dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya.⁶ Akta otentik yang dibuat oleh notaris pada hakikatnya memuat keterangan sesuai dengan keinginan atau kehendak para pihak yang merupakan suatu kebenaran formal. Apabila notaris telah selesai membuat aktanya, notaris berkewajiban untuk membacakan isi dari akta tersebut di hadapan para penghadap atau klien, yang wajib dihadiri oleh dua orang saksi, dan akta tersebut wajib ditandatangani oleh para pihak atau klien, saksi-saksi dan notaris itu sendiri.⁷ Keberadaan akta notaris dirasa sangat penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, seorang notaris sudah sepantasnya dapat menjamin adanya kepastian hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁸

Pengertian akta otentik lebih lanjut telah ditetapkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUH Perdata). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik 3 (tiga) unsur penting yang wajib dipenuhi agar suatu akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik, yaitu:⁹

1. Mengenai bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang;
2. Mengenai pembuatannya wajib dirumuskan oleh pejabat yang memiliki kewenangan; dan
3. Dibuat di wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, akta otentik termasuk suatu alat bukti tertulis yang berkekuatan sempurna di hadapan pengadilan, apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari. Apabila salah satu unsur dari persyaratan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka hilanglah otentisitas akta tersebut. Dengan kata lain, akta tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, melainkan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan saja.

⁴ Herlien Budiono. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 22.

⁵ Punarbawa, P. A., & Sarjana, I. M. (2018). Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing. *Kertha Semaya*. h. 20.

⁶ H. Salim HS. & H. Abdullah. (2007). *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 101-102.

⁷ Suwignyo, H. (2009). Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik. *NOTARIUS*, 1(1), 63-74. h. 74.

⁸ RAHMA, H. F. (2018). TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PENGGUNA JASA DALAM PERMENKUMHAM NOMER 9 TAHUN 2017. h. 51.

⁹ Herlien Budiono. *Op. Cit.* h. 59.

Notaris selain mempunyai kewenangan juga mempunyai kewajiban dan larangan yang wajib ia taati dan patuhi. Kewenangan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN. Sedangkan, mengenai kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.¹⁰ Kemudian, mengenai larangan notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN. Dalam pasal 16 ayat (1) tersebut notaris wajib bertindak secara adil, mandiri, jujur, bertanggung jawab dan bekerja secara profesional dengan tidak memihak dan terpengaruh oleh siapapun.¹¹ Dengan adanya peraturan tersebut, notaris dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dan kepercayaan itu dapat diperkuat karena masyarakat mengetahui akan adanya suatu kepastian yang terjamin untuk kepentingannya, yang dimana peraturan tersebut juga bertujuan untuk sarana kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.¹² Sebagai seorang notaris haruslah memperhatikan mengenai perilaku profesi notaris itu sendiri adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Notaris harus memiliki integritas moral yang baik. Pelaksanaan tugas dalam profesi Notaris harus dilandasi pada pertimbangan moral. Meskipun diiming-imingi imbalan jasa yang tinggi, tetapi jika hal yang akan dilakukan berbalik arah dengan moral baik yang seharusnya maka hal tersebut patut dihindari.
2. Notaris harus bertindak jujur kepada setiap klien yang datang menghadapnya dan juga kepada diri sendiri (kejujuran intelektual), serta harus mengetahui seberapa kapasitas kemampuannya karena ia tidak boleh memberikan janji-janji yang hanya sekedar untuk menyenangkan hati kliennya agar klien tersebut tetap memerlukan dan memakai jasanya.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris wajib tanggap, peka dan mempunyai ketajaman dalam berfikir, serta dapat memberikan analisis yang baik terhadap fenomena hukum yang ada pada masyarakat. Hal tersebut agar nantinya seorang notaris memiliki keberanian untuk mengambil tindakan dan keputusan yang tepat dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku melalui produk yang dibuatnya, yaitu akta otentik. Notaris juga harus memiliki keberanian untuk menolak dengan tegas apabila dalam pembuatan aktanya mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum, etika, dan moral.¹³

Jabatan profesi notaris merupakan cerminan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pekerjaan berupa akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Dari konteks ini jabatan notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Notaris wajib memberikan pelayanan jasa di bidang hukum perdata kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pelayanan diartikan dalam konteks yang luas tidak hanya membuat akta, melakukan legalisasi akta di bawah tangan, memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum yang

¹⁰Diana, P. V. P., Mertha, I. K., & Artha, I. G. (2015). PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PIHAK. *Acta Comitatus*, 161-172. h. 6.

¹¹Asmara, D. A. (2006). *PERANAN NOTARIAT SEBAGAI PEJABAT LELANG DALAM UPAYA SOSIALISASI LELANG DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro). h. 76.

¹²Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S. (2018). PELAKSANAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS DI KOTA DENPASAR. *Acta Comitatus*, 213-218. h. 2.

¹³Setiawan, W. (2004). Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Media Notariat, Surabaya*. h. 25.

menyangkut bidang kenotariatan, tetapi di samping itu, notaris juga bertugas terkait dengan sejumlah aspek pemberian kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik serta keramahan notaris beserta pegawainya dalam melayani klien. Keseluruhan hal tersebut merupakan bagian dari aktivitas penuh notaris dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan pemaparan di atas, penting dilakukannya penelitian mengenai: bagaimanakah efektivitas penerapan etika profesi oleh notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien?; dan bagaimanakah akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan etika profesi dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti data sekunder di awal penelitian dan dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan, yaitu responden dari masyarakat secara langsung.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, pengertian penelitian empiris adalah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum, terutama bertujuan untuk menelaah perilaku hukum warga masyarakat.¹⁵ Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari praktisi hukum dan sejenisnya yang terkait dengan penelitian.¹⁶ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum dan teknik wawancara (*interview*) secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan yang memiliki kewenangan terkait dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan jawaban yang relevan. Kemudian setelah dikumpulkan, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan logis. Keseluruhan data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan disusun secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dan perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien

Notaris merupakan profesi yang menempati jabatan hukum yang bertugas menyediakan pelayanan jasa di bidang hukum perdata kepada masyarakat. Notaris dibebankan dengan tanggung jawab terkait alat bukti otentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Notaris sebagai penyedia

¹⁴Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. h. 52.

¹⁵*Ibid*, h. 51.

¹⁶*Ibid*.

layanan jasa hukum sangat berperan dalam membantu menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks pencegahan (*preventif*). Notaris sebagai pejabat umum, dalam hal tindakan yang dilakukannya bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memenuhi kepentingan akan kebutuhan masyarakat luas yang memerlukan alat bukti otentik. Pekerjaan notaris tidak bisa dipandang sebagai pekerjaan biasa untuk mencari nafkah semata, karena notaris merupakan profesi pengabdian kemanusiaan, di samping harus bekerja secara profesional, tidak memihak, dan independen, ia harus mempunyai sikap, perilaku, dan moral yang baik demi menjaga martabat profesi jabatannya.

Sikap profesionalisme yang harus dimiliki seorang notaris dalam bekerja juga berkaitan dengan keahlian khusus yang ia miliki tentunya di bidang notaris, disertai rasa tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum, bekerja dengan memomorduakan kepentingan pribadi, dan bersikap adil tanpa memandang derajat atau status sosial seseorang yang akan menjadi kliennya. Notaris dalam melakukan pekerjaannya diharapkan senantiasa memperhatikan etika profesinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Dengan kata lain, seorang notaris dituntut untuk menunjukkan perilaku atau sikap yang etis, dan senantiasa pula mempertahankan harkat dan martabat profesi sesuai dengan hati nurani.

Secara sederhana, etika adalah petunjuk bagaimana sebaiknya manusia bersikap atau bertingkah laku baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial mereka. Etika tersebut meliputi, petunjuk peraturan tentang keagamaan, kesusilaan, hukum dan adat istiadat setempat. Etika profesi merupakan sikap hidup dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pengemban profesi, yakni dalam hal ini profesi notaris. Notaris harus memiliki akhlak yang baik untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi, karena masyarakat pun tidak dapat mengetahui dan menilai apa saja dan bagaimana saja notaris harus bersikap dalam menjalankan profesinya. Maka dari itu, notaris memerlukan pedoman secara obyektif terhadap sikap dan perilaku yang baik, yang diwujudkan dalam sekumpulan kaidah atau norma yang harus dipatuhi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pedoman tersebut dapat diartikan sebagai etika dalam arti sempit yaitu, kode etik profesi.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dalam memberikan kepastian hukum bagi klien atau para penghadapnya ia melakukan perbuatan tercela, tentunya akan menjadi sangat berbahaya. Hal tersebut misalnya seperti ikut membantu memanipulasi data dan fakta yang kemudian dituangkan ke dalam akta otentik untuk kepentingan salah satu pihak atau orang-orang tertentu, sehingga dapat merugikan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, tidak heran apabila seorang notaris yang sering dipanggil untuk datang ke pengadilan atas suatu kasus tertentu, misalnya ia dapat ditunjuk menjadi seorang saksi untuk menerangkan akta yang telah dibuatnya, atau terlebih lagi apabila ia sempat terlibat menjadi pelaku dalam kasus tersebut, ia pun juga dapat menjadi tersangka. Hal tersebut jelas mengurangi integritas notaris dan kepercayaan akan notaris di mata masyarakat.

Perilaku notaris wajib berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seorang notaris, baik dalam hal menjalankan jabatannya maupun dalam hal di luar menjalankan

jabatannya. Pasal 83 ayat (1) UUJN menentukan sebagai berikut: “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 menetapkan Kode Etik Notaris yang termuat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang dirangkum sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan membuat kode etik yang ditetapkan dalam kongres tersebut, yang wajib dijadikan sebagai pedoman yang berisi kaidah-kaidah moral, dan wajib pula ditaati oleh setiap anggota perkumpulan tersebut.
- b. Dalam rangka penegakan kode etik, Dewan Kehormatan dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan integritas para anggota perkumpulan.
- c. Pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan dapat bekerja sama dan juga saling berkoordinasi dengan Majelis Pengawas dalam melakukan upaya-upaya penegakan kode etik.

Menurut Notaris/PPAT I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum, “penegakan kode etik dalam hal penerapan etika profesi oleh notaris, yang menjadi acuan utama adalah integritas dan komitmen seorang notaris, demi mempertahankan dan menjaga citra profesi notaris itu sendiri”. Penegakan kode etik dapat diartikan sebagai kemampuan perkumpulan notaris dan organisasi notaris untuk menerapkan dan memperkuat prinsip kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut etika profesi bagi para anggota organisasi notaris tersebut. Kemudian selain itu, penegakan kode etik juga dilakukan untuk memproses adanya dugaan terjadinya suatu pelanggaran etika profesi dan menindaklanjuti anggota notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Keseluruhan hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas anggota notaris itu sendiri. Mereka harus senantiasa saling memperhatikan dan menjaga kualitas intelektual para anggotanya, agar kualitas pelayanan mereka kepada masyarakat menjadi lebih baik kedepannya.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Melaksanakan Etika Profesi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien

Seorang notaris dalam membuat suatu akta wajib memuat keterangan berdasarkan atas keinginan atau kehendak dari para pihak yang datang menghadap dirinya. Apabila terjadi suatu permasalahan hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris di kemudian hari, maka dalam hal ini notaris secara moral wajib untuk bertanggung jawab dan para pihak yang merasa dirugikan juga dapat menuntut pertanggungjawaban kepada notaris tersebut. Mengenai pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan secara perdata atau secara pidana. Dalam hal notaris terbukti melakukan suatu kesalahan terkait dengan akta yang dibuatnya, maka notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif. Untuk dapat memintakan pertanggungjawaban tersebut maka sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap, akta notaris tersebut haruslah dianggap sebagai akta yang sah serta mengikat (*presumptio justea causa*).¹⁷

¹⁷Hakim, S. H. (2015). Prinsip Kehati-hatian Notaris pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (Studi di Bank Muamalat Indonesia). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. h. 3.

Kode Etik Notaris memiliki kekuatan yang mengikat dan mengharuskan bagi notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada kliennya agar berjalan dengan efektif. Menurut Notaris/PPAT I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum, "Notaris dalam kewenangannya membuat suatu akta haruslah berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam UUJN, apabila notaris tersebut terbukti melanggar UUJN, maka ia dapat dituntut secara perdata ataupun pidana, akan tetapi terkait dengan pelanggaran UUJN tersebut dalam hal pembuatan akta otentik, notaris dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat dari Majelis Pengawas".

Akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan etika profesi dalam memberikan pelayanan jasa kepada kliennya dapat berakibat fatal, baik merugikan pihak notaris maupun kliennya tersebut, serta pihak-pihak terkait lainnya, terutama dalam hal pembuatan akta otentik. Misalnya seperti, notaris dalam membuat akta memuat keterangan palsu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut tentu dapat mengakibatkan kerugian yang akan diderita oleh klien atau para pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan akta ke pengadilan. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi apabila ia terbukti melanggar UUJN atau Kode Etik Notaris. Sebelum dijatuhkannya sanksi terhadap notaris, tindakan utama yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah setempat yang berwenang untuk itu dimana ia berkedudukan. Melalui laporan yang diberikan tersebut, selanjutnya Majelis Pengawas Daerah akan mengambil tindakan untuk memeriksa adanya dugaan terjadinya suatu pelanggaran. Setelah sidang diadakan, Majelis Pengawas Daerah akan merancang dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud kepada Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a UUJN.

Kemudian setelah laporan tersebut diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka akan diselenggarakan sidang yang bertujuan untuk memeriksa dan memutuskan tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Majelis Pengawas Daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Majelis Pengawas Wilayah selanjutnya akan memanggil notaris yang dilaporkan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan yang telah diterima. Dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f, Majelis Pengawas Wilayah kemudian akan memberikan sanksi yaitu berupa teguran secara lisan atau teguran secara tertulis, dan mengusulkan pemberhentian terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu berupa:

- a. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Pemberhentian secara tidak hormat.

Setelah laporan terkait pelanggaran notaris dari Majelis Pengawas Daerah ke Majelis Pengawas Wilayah diteruskan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka apabila Majelis Pengawas Pusat hendak mengusulkan pemberian sanksi dengan pemberhentian terhadap notaris secara tidak hormat, ia dapat mengajukan kepada Menteri yang berwenang untuk itu. Sanksi pemberhentian secara tidak hormat ini adalah merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut sebagaimana diakui juga oleh Notaris/PPAT I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum bahwa, "notaris yang tidak melaksanakan etika profesi dalam memberikan pelayanan

jasa kepada kliennya dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah agar diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun kode etik profesi”.

Kode etik profesi bagi seorang notaris bersifat penting sebagai aturan etis yang harus dipenuhi terkait profesinya, dan juga karena pada hakikatnya pekerjaan notaris lebih condong berorientasi pada kepentingan hukum. Dasar hukum seorang notaris terletak pada aktifitasnya, yakni dalam hal pembuatan akta otentik yang menyangkut status harta benda, hak-hak, dan kewajiban klien atau para pihak yang datang menghadap dirinya dan membutuhkan jasa notaris tersebut. Kode etik profesi berfungsi sebagai kendali, batasan dan aturan untuk menghindari terjadinya tindakan tidak adil sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan hukum yang bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, notaris dalam melakukan pelayanan jasa kepada klien atau para pihak yang datang menghadap dirinya, harus bersikap secara etis berdasarkan etika profesinya. Notaris harus bekerja secara profesional, bersikap mandiri, tidak memihak dan bergantung kepada siapa pun, serta independen. Seorang notaris dituntut untuk mampu mempertahankan harkat dan martabat profesi jabatan notaris sesuai dengan hati nurani dalam memberikan pelayanan jasa. Akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan etika profesi dalam memberikan pelayanan jasa kepada kliennya dapat berakibat fatal, baik merugikan pihak notaris maupun kliennya, serta pihak-pihak terkait lainnya, terutama dalam hal pembuatan akta otentik. Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan akta ke pengadilan. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi apabila ia melanggar UUJN maupun Kode Etik Notaris. Salah satu sanksi tersebut berupa sanksi administratif yaitu teguran secara lisan, teguran secara tertulis, sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat dari Majelis Pengawas. Seorang notaris harus memperhatikan etika profesi jabatan yang diembannya terutama dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh seorang notaris wajib mengacu dan taat pada ketentuan UUJN serta Kode Etik Notaris. Acuan dan ketaatan ini bertujuan agar pelaksanaan profesi notaris dalam mengabdikan pada masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat, serta keluhuran profesi notaris. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dapat menyebabkan hilangnya daya otentik suatu akta yang dibuat oleh notaris.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Budiono, Herlien. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- HS, H. Salim & H. Abdullah. (2007). *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Jurnal

- Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif*, 17(3), 173-183.
- Diana, P. V. P., Mertha, I. K., & Artha, I. G. (2015). PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PIHAK. *Acta Comitatus*, 161-172.
- Hakim, S. H. (2015). Prinsip Kehati-hatian Notaris pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (Studi di Bank Muamalat Indonesia). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S. (2018). PELAKSANAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS DI KOTA DENPASAR. *Acta Comitatus*, 213-218.
- Punarbawa, P. A., & Sarjana, I. M. (2018). Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing. *Kertha Semaya*.
- Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DALAM KAITAN CYBER NOTARY. *Acta Comitatus*, 172-182.
- Setiawan, W. (2004). Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Media Notariat, Surabaya*.
- Suwignyo, H. (2009). Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik. *NOTARIUS*, 1(1), 63-74.

Tesis/Disertasi

- Asmara, D. A. (2006). *PERANAN NOTARIAT SEBAGAI PEJABAT LELANG DALAM UPAYA SOSIALISASI LELANG DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- RAHMA, H. F. (2018). TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PENGGUNA JASA DALAM PERMENKUMHAM NOMER 9 TAHUN 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Kode Etik Notaris.